

BAB 2

KAJIAN TEORITIS

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Analisis Jalur

- a. Analisis jalur digunakan untuk menelaah hubungan antar variabel pada model kausal yang telah dirumuskan peneliti atas dasar pertimbangan teoritis dan pengetahuan tertentu (Sudjana, 1992; Kerlinger dan Pedhazur, 1973). Hubungan kausal selain didasarkan pada data, juga didasarkan pada pengetahuan, perumusan teoritis, asumsi dan analisis logis (Sudjana, 1992). Di bawah anggapan tertentu, analisis jalur dapat dipergunakan untuk menguji seperangkat hipotesis kausal serta untuk menafsirkan hubungan tersebut.
- b. Analisis jalur merupakan suatu analisis yang dikembangkan pertama kali oleh Sewall Wright. Ia adalah seorang ahli genetika yang mengembangkan analisis jalur dalam genetika populasi melalui artikel yang berjudul : "*Correlation and causation*" pada tahun 1921, yang menjelaskan hubungan kausal pada penelitian genetika populasi. Setelah Duncan memperkenalkan dalam literatur sosiologi maka analisis jalur menjadi dikenal luas dan semakin luas penggunaannya. Duncan melihat daya kemampuan teknik analisis jalur di dalam memecahkan problema yang dihadapi oleh ilmu sosiologi waktu itu.
- c. Analisis jalur dikembangkan sebagai metode untuk mempelajari pengaruh (efek) secara langsung dan secara tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis ini merupakan salah satu pilihan dalam rangka mempelajari ketergantungan sejumlah variabel di dalam model (Kerlinger dan Pedhazur, 1973). Menurut Munro seperti yang dikutip Thohirun (1991) analisis jalur merupakan metode yang baik untuk menerangkan apabila kita memiliki seperangkat data yang besar untuk di analisis dan mencari hubungan kausal.

⇒ Asumsi-asumsi dalam penggunaan analisis jalur

Setiap analisis yang dipilih untuk memecahkan suatu permasalahan statistika tidak terlepas adanya asumsi-asumsi yang harus ditaati, agar kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Heise yang dikutip Thohirun (1991) dan Sudjana (1992) untuk menentukan apakah analisis jalur tepat atau tidak dipergunakan dalam menganalisis data perlu diperhatikan dahulu asumsi yang diperlukan. Asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis jalur adalah :

- (1) Hubungan antara peubah-peubah dalam model adalah linier, aditif dan kausal.
- (2) Peubah-peubah yang sedang diamati mempunyai sifat aditif artinya variabel yang tidak mempunyai sifat multikatip dan eksponensial tidak dapat dipergunakan.
- (3) Peubah-peubah residual dalam model tidak berkorelasi dengan peubah-peubah yang sesudahnya (peubah regresi lainnya).
- (4) Dalam sistem hanya terjadi arus kausal searah, dan
- (5) Peubah-peubah diukur dalam skala interval.

⇒ Diagram jalur sebagai model kausal

Suatu diagram jalur akan sangat membantu di dalam menganalisis dan menginterpretasikan hubungan yang dihipotesiskan. Oleh karena itu sebelum melakukan analisis jalur peneliti harus mengetahui terlebih dahulu model atau diagram jalurnya. Pendapat lain yang mengatakan berfikir secara kausal dan menyusun suatu diagram berarah merupakan cerminan proses kausal yang nantinya dapat mempermudah penafsiran dan penginterpretasian terhadap hipotesis yang diajukan Asher yang dikutip Thohirun (1991).

Dalam menyusun model kausal masalah yang kita hadapi adalah menetapkan variabel mana di dalam model yang merupakan variabel bebas dan mana yang menjadi variabel tergantung. Urutan dalam model tersebut harus disusun berdasarkan suatu teori yang benar dan kuat. Model kausal dibedakan antara variabel-variabel eksogenus dan variabel

endogenus (Kerlinger dan pedhazur, 1973; Sudjana, 1992). Variabel eksogenus adalah variabel yang keragamannya tidak dipengaruhi oleh penyebab di dalam sistem. Variabel ini tidak dapat ditetapkan hubungan kausalnya. Variabel ini ditetapkan sebagai variabel pemula yang memberi efek terhadap variabel lain. Variabel ini tidak diperhitungkan jumlah sisanya (*disturbance*). Sedangkan variabel endogenus adalah variabel yang keragamannya dijelaskan oleh variabel eksogenus dan variabel endogenus lainnya dalam model.

⇒ Persamaan Struktural (*Struktural equation*)

Sejak masa dikembangkan model kausal oleh ahli sosiologi di Amerika Serikat tahun 1961 boleh dikatakan bahwa kemampuan para ahli sosiologi dalam menjelaskan teori-teorinya yang makin kompleks menjadi semakin baik. Pembuktian empiris yang banyak dilakukan adalah melalui teknik yang biasa disebut model diagram. Beberapa tahun kemudian disamping model diagram tersebut dikembangkan pula *struktural model*. Perbedaan antara kedua model tersebut ditunjukkan sebagai berikut : model diagram dalam menganalisis data yang diperoleh terbatas pada kemampuan menaksir pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tergantung. Hubungan dalam model diagram tersebut tidak berarti bahwa variabel tersebut mempunyai hubungan kausal. Model diagram hanya mengandung arti adanya hubungan, tetapi apakah variabel tersebut mempunyai hubungan kausal tidak dipersoalkan. Menurut Suwarno seperti yang dikutip Thohirun (1991) bila kita mulai mempersoalkan hubungan kausal maka kita harus menggunakan model struktural.

Menurut Kerlinger (1973) dan Gazpersz (1995) koefisien jalur merupakan bentuk regresi linier yang variabelnya telah dibakukan (standard) dalam sistem yang tertutup. Selanjutnya dikatakan bahwa diagram jalur biasanya mempunyai nilai rata-rata nol dan ragam satu.

⇒ Menghitung koefisien jalur

Koefisien jalur adalah rasio simpangan baku akibat semua variabel bebas bersifat konstan kecuali satu variabel yang sedang dipermasalahkan terhadap simpangan baku total (Kerlinger, 1973). Koefisien jalur dapat mengukur kekuatan sebuah variabel bebas terhadap variabel tergantung. Besarnya koefisien merupakan akibat langsung dari sebuah variabel bebas terhadap variabel tergantung. Notasi yang digunakan untuk koefisien jalur adalah P_{ij} , i menyatakan akibat atau variabel tergantung dan j menyatakan penyebab atau variabel bebasnya. Nilai koefisien jalur diperoleh dari hasil penyelesaian seperangkat persamaan. Selain variabel eksogenus (bebas), variabel endogenus juga dapat berpengaruh terhadap variabel endogenus yang lain. Maka sistem ini dikatakan merupakan sistem koefisien majemuk.

Menurut Gazpersz (1995) apabila koefisien jalur P_{ij} telah diperoleh, maka beberapa informasi penting akan diperoleh berdasarkan metode analisis jalur, antara lain :

- (1) Pengaruh langsung variabel bebas yang dibakukan X_i , terhadap variabel tergantung Y , diukur oleh koefisien jalur P_{ij} .
- (2) Pengaruh tidak langsung variabel bebas X_i terhadap variabel tergantung Y , melalui variabel bebas X_j (melalui kehadiran variabel bebas X_j dalam model), diukur oleh besaran $(P_{ij}r_{ij})$ yaitu pengaruh langsung variabel bebas X_j terhadap variabel tergantung Y dikalikan koefisien korelasi X_i dengan X_j .
- (3) Pengaruh galat (error) atau sisaan (residual), yang tidak dapat dijelaskan oleh model analisis jalur (pengaruh-pengaruh yang tidak dapat dijelaskan oleh suatu model dimasukkan sebagai pengaruh galat atau sisaan), diukur oleh besaran :
 besaran U^2 dalam analisis jalur adalah serupa dengan besaran $(1 - R^2)$ dalam analisis regresi berganda, di mana keduanya memiliki nilai yang sama besar.

⇒ Pengujian model

Analisis jalur merupakan alat analisis yang penting untuk menguji suatu teori kausal. Melalui analisis ini peneliti dapat menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel yang satu dengan yang lainnya.

Jika ada m variabel, yaitu $X_1, X_2, \dots, X_m$ dan tiap X_i dan X_j terdapat hubungan linier, maka dapat dihitung matrik korelasi R berordo $m \times m$ yang anggotanya adalah koefisien korelasi antara X_i dan X_j . Perhitungan matrik korelasi ini selalu bisa dilaksanakan terlepas bentuk model yang digunakan.

Ada 3 (tiga) cara yang biasa dipergunakan untuk menguji suatu model yang diajukan. Berdasarkan teori yang dimiliki, peneliti bisa menghilangkan jalur-jalur tertentu dalam model. Ini berarti, untuk jalur tersebut harus ditetapkan koefisien jalurnya sama dengan nol. Sehingga koefisien korelasinya hanya dibentuk oleh efek-efek tidak langsung saja. Ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Menghitung semua koefisien jalur dalam model kemudian dilakukan penyaringan berdasarkan uji statistik kebermaknaan seperti yang dilakukan Heise, yang dikutip (Thohirun, 1991). Uji statistik ini dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien arah β untuk regresi berdasarkan data yang telah dibakukan. Jika β signifikan, maka koefisien jalur tersebut juga signifikan. Sedangkan koefisien jalur yang tidak signifikan dihilangkan.
- (2) Menggunakan kebermaknaan (signifikansi) koefisien. Koefisien yang dirasakan tidak bermakna dihilangkan, sedangkan yang bermakna dipertahankan. Menurut Sudjana (1992) dan beberapa studi empirik menyarankan untuk menggunakan pegangan bahwa koefisien jalur lebih kecil atau kurang dari 0.05 dianggap tidak bermakna.
- (3) Dengan menghilangkan jalur-jalur tertentu sehingga modelnya menjadi lebih sederhana dan selanjutnya dapat pula dibentuk matrik korelasi R^* dari model persamaan yang dirumuskan. Apabila matrik R^* sama atau mendekati matrik R , maka model yang disederhanakan itu dapat

dipertahankan, bila tidak maka model harus diganti dengan model lain. Untuk menentukan kriteria apabila matrik R^* sama atau mendekati matrik R , Kerlinger (1973) dan Sudjana (1992) mengatakan bahwa kedua matrik itu cukup dekat jika koefisien-koefisien korelasi yang sesuai perbedaannya kurang dari 0.05.

2.1.2 Regresi Linier Berganda (*Multiple Regression*)

Dalam menentukan hubungan dua variabel atau lebih dapat ditempuh melalui analisis regresi, variabel di sini dibedakan menjadi variabel “pengaruh” yang biasa disebut variabel bebas dan variabel yang “dipengaruhi” atau biasa disebut variabel tergantung. Misalnya kita memiliki seperangkat variabel yang akan diamati. Y_i sebagai variabel tergantung dan $X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{pi}$ sebagai variabel bebas ke- i dengan $i = 1, 2, 3, \dots, n$. Persamaan regresi linier berganda untuk kasus ke- i dapat dibuat sebagai berikut :

$$Y_i = B_0 + B_1X_{1i} + B_2X_{2i} + \dots + B_pX_{pi} + \epsilon_i$$

dimana :

- P = Banyaknya variabel bebas.
- ϵ_i = Sisaan atau pengaruh pengacakan.
- B_0 = Intersep, nilai Y kalau $X = 0$
- B_p = Koefisien regresi untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dari X terhadap Y .

Asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi linier ganda adalah :

- a. Kenormalan artinya sisaan penyebar mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian σ^2 .
- b. Kehomogenan varian sisaan dan kebebasan yang berarti $E(\epsilon_i \epsilon_j) = 0$ untuk $i \neq j$.
- c. Tidak ada autokorelasi, dan
- d. Tidak adanya “*multicolinear*” yang berarti tidak ada hubungan linier yang eksak antar variabel-variabel bebas.

Bila anggapan di atas tidak dipenuhi ada kemungkinan bahwa antara variabel bebas dengan variabel tak bebas bukan hubungan linier. Dengan demikian pemenuhan terhadap asumsi yang mendasari penerapan uji regresi linier ganda adalah hal yang penting untuk menjamin keabsahan pengujian baik uji t maupun uji F yang dilakukan untuk mengambil suatu kesimpulan.

Dalam analisis regresi dapat dilihat faktor-faktor yang berhubungan nyata antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Untuk membuktikan faktor yang berhubungan nyata tersebut dapat dilihat dari tingkat kebermaknaan dari nilai koefisien regresi (B). dalam praktek tidaklah pernah diketahui nilai B_0 dan B_p parameter yang sebenarnya. Hanya berdasarkan suatu sampel kita dapat menghitung harga B_0 dan B_p melalui harga b_0 dan b_p . Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menaksir koefisien regresi, salahsatu diantaranya adalah metode kuadrat terkecil (LSE).

2.1.3 Definisi Kriminalitas

Kriminalitas adalah tingkah laku kejahatan yang dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan masyarakat. Ancaman tindak kejahatan, pemerasan, penodongan, penjamoretan, pemerkosaan sampai pembunuhan seakan mengintai setiap saat dimanapun kita berada (Elwin Tobing, 1995).

Menurut teori sosiologi, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang memiliki solidaritas, cinta kasih dan nilai-nilai luhur yang tinggi. Akan tetapi, dari teori-teori psikologi dapat dipahami bahwa tekanan lingkungan (eksternal) dan adanya dorongan nafsu (internal) dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik terhadap alam lingkungannya maupun terhadap sesama manusia. Hal ini dapat membantu dalam menjelaskan mengapa manusia terkadang lebih buas dari binatang buas manapun.

Tekanan untuk bertahan hidup (survive) misalnya, akan mendorong manusia bertindak apapun, termasuk tindakan kriminal, yang justru sangat berbahaya buat dirinya. Ini yang luas terjadi di jaman ekonomi sulit sekarang. Tuntutan untuk bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga memaksa seseorang untuk bertindak kriminal.

Menurut Nicole (1979) ada beberapa macam teori mengenai kriminalitas, yaitu :

1. Teori Kriminologi yang Positif.

a. Teori-teori yang berpusat pada keanehan dan keabnormalan si individu, yaitu :

⇒ Teori-teori tipe fisik

Teori tipe ini berlandaskan pada pendapat umum bahwa terdapat perbedaan-perbedaan biologis pada tingkah laku manusia. Seseorang bertindak laku berbeda, karena ia memiliki struktur yang berbeda. Sesungguhnya tingkah laku jahat seseorang merupakan cacat-cacat biologis dan inferioritas. Yang tergolong dalam teori ini adalah:

1. *Fisiognomi dan frenologi*. Teori Fisiognomi berlandaskan pada hubungan antara raut muka dengan kelakuan Manusia. Ciri-ciri kurang baik; pria tidak berkumis, wanita berkumis, mata yang Gelisah, dagu yang lemah. Teori ini mendorong lahirnya frenologi. Teori Frenologi berlandaskan pada otak yang merupakan alat atau organ pada akal. Teori ini berdalil; lahirnya tengkorak sesuai dengan isinya, akal terdiri dari kecakapan-kecakapan dan fungsinya, dan kecakapan-kecakapan tersebut bersangkut dengan bentuk otak dan tengkorak. Beberapa kecakapan yang dimiliki seseorang yaitu: cinta birahi, cinta keturunan, keramahan, sifat militan, sifat perusak, sifat mengakui sesuatu sebagai milik, sifat hati-hati, harga diri, ketegasan, sifat meniru, kebaikan, sifat membangun dan lain sebagainya. Kecakapan tersebut dapat

digolongkan dalam 3 bagian : naluri-naluri aktif atau rendah, sentimen-sentimen moral, dan kecakapan-kecakapan intelektual. Menurut teori ini kejahatan disebabkan karena naluri-naluri rendah, seperti cinta birahi, cinta keturunan, sifat militan, sifat rahasia.

2. *Antropologi Kriminal*. Teori ini berlandaskan pada penjahat merupakan interior secara organis. Sedangkan kejahatan adalah hasil daripada pengaruh milieu terhadap organisme manusia yang rendah tingkatannya. Bagi penjahat hanya dapat dilakukan melalui cara eliminasi mutlak atau penumpasan secara total pada orang-orang secara fisik, mental dan moral.
3. *Teori interioritas dan teori tipe fisik* (Kretschmer-Sheldon). Teori interioritas berlandaskan pada anggapan tentang adanya interioritas/cacat dasar telah diperkuat dengan pernyataan-pernyataan, bahwa macam-macam tabiat yang dapat dilihat mencerminkan suatu kekurangan dengan mana orang dilahirkan di dunia ini, dan yang bersifat konstitusional. Teori tipe fisik; berlandaskan pada tiga tipe; astenik berhubungan dengan pencurian kecil-kecilan dan pemalsuan, atletik, kebanyakan bersifat schizoprene, tipe ini berhubungan kejahatan kekerasan; piknik pada umumnya circular berhubungan dengan penipuan, pemalsuan dan kejahatan kekerasan; displastik dan campuran berhubungan dengan kejahatan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tetapi juga dengan kejahatan kekerasan
4. *Teori tipe test mental dan kelemahan jiwa*. Teori ini berlandaskan pada pendapat bahwa penjahat adalah tipe orang-orang yang memiliki cap tertentu.
5. *Teori kewarisan*. Teori ini berlandaskan bahwa orang tua yang berperilaku jahat akan diturunkan kepada anaknya.

6. *Teori psikopati*. Teori ini berlandaskan bahwa kejahatan merupakan kelainan-kelainan dari pelakunya.
- b. Teori-teori yang berpusat kepada pengaruh-pengaruh kelompok atau pengaruh kebudayaan, yaitu :
 - ⇒ *Hubungan antara kondisi ekonomi dengan kriminalitas*. Teori ini berlandaskan bahwa kejahatan dapat terukur melalui statistik.
 - ⇒ *Kejahatan sebagai tingkahlaku yang dipelajari secara normal*. Teori ini berlandaskan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang dipelajari seperti kegiatan manusia yang selalu mencerminkan sesuatu dari kepribadiannya dan dari kecakapan-kecakapannya namun berlawanan dengan hukum dan bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat
 - ⇒ *Teori konflik kelompok*. Teori ini berlandaskan bahwa definisi kejahatan diberikan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas.

2. Teori Kriminologi Kritis.

- a. Interaksionisme simbolik dan pembelajaran sosial. Teori dalam kelompok ini berlandaskan pada :
 1. *Pluralism of selves* (kemajemukan diri). Berpendapat bahwa seseorang mempunyai diri sosial, kesadaran diri dianggap bergantung pada berbagai reaksi dari berbagai individu.
 2. *The looking glass self*. Berpendapat bahwa citra tentang penampilan kepada orang lain, citra terhadap penilaiannya tentang penampilan, dan beberapa macam perasaan diri (*self feeling*) seperti kebanggaan.
 3. *Definition of the situation*. Berlandaskan bahwa bila seseorang mendefinisikan suatu situasi sebagai kenyataan, maka akan nyata dalam akibatnya.

4. *Interaksionisme simbolik*. Berlandaskan bahwa tingkah laku yang dimiliki seseorang merupakan perwujudan dari tingkah laku masyarakat sekitarnya.
 5. *Aktualisasi penyimpangan*. Berlandaskan bahwa belajar menjadi penyimpang melibatkan suatu proses sosialisasi di mana instruksi rangsangan, persetujuan, kebersamaan, perbincangan gaya hidup bahwa pelaku penyimpangan sendiri mulai mendefinisikannya sebagai biasa dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Teori labeling. Teori ini berlandaskan bahwa kriminalitas adalah sebuah kata, dan bukan perbuatan atau tindakan, kriminalitas didefinisikan secara sosial dan orang-orang kriminalitas dihasilkan secara sosial dalam suatu proses yang mendorong orang banyak memberikan cap pada kelompok minoritas, di mana dalam banyak hal bahkan memungkinkan mereka memaksakan konsekuensi daripada labeling tersebut. Akibatnya orang yang diberi cap cacat mungkin tidak bisa berbuat lain daripada peranan yang telah diberikan kepadanya.

2.1.4 Hakekat Penduduk

Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1992) bahwa penduduk adalah orang dalam matryanya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri yang dikutip oleh Sulistijowati Soegondo (2003), definisi penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah negara Republik Indonesia.

Adanya perbedaan sumber daya antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan sebaran penduduk. Biasanya penduduk akan berkumpul pada suatu wilayah yang dapat menunjang kehidupannya. Disamping itu, di ibukota persebaran penduduk dipengaruhi pula oleh kebijakan yang digariskan oleh Pemda DKI Jakarta.

Pada tahun 1980, sebaran penduduk di DKI Jakarta masih cukup merata. Wilayah yang paling banyak dihuni oleh penduduk DKI Jakarta adalah Jakarta Timur, sekitar 26,75 persen penduduk DKI Jakarta. Selain wilayahnya yang cukup luas, udara di Jakarta Timur relatif lebih bersih dan masih terdapat daerah resapan air sehingga air tanahnya masih dapat dikonsumsi sebagai air minum, terutama ke arah bagian selatan. Tampaknya dengan alasan yang sama, Jakarta Selatan pun banyak diminati sebagai tempat bermukim oleh penduduk Ibukota (21,82 %). Persentase penduduk yang tinggal di Jakarta Barat cukup tinggi yaitu sekitar 24 persen hal ini sesuai dengan pengembangan poros Barat dan Timur pada RUTR DKI Jakarta Tahun 1985-2005. Di samping itu kotamadya Jakarta Barat terutama bagian Barat dan Selatan relatif layak huni. Wilayah yang kurang diminati adalah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, masing-masing hanya sekitar 17 persen dan 9,59 persen dari penduduk Ibukota. Hal ini bisa dimaklumi karena Jakarta Utara selain daerahnya cukup panas juga sebagian masih merupakan rawa-rawa, sedangkan Jakarta Pusat harga tanah dan rumah relatif tinggi, sehingga penduduk menengah ke bawah agak sulit untuk bisa tinggal di wilayah tersebut.

Awal tahun 80-an, Pemda DKI Jakarta menyusun Rencana Umum Tata Ruang di Ibukota. Berdasarkan RUTR tersebut, Wilayah Jakarta Pusat diperuntukkan sebagai daerah bisnis dan perumahan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya relokasi perumahan di Wilayah Ibukota. Pergeseran tata guna lahan di Kotamadya Jakarta Pusat menyebabkan penduduk di daerah tersebut harus mencari lokasi baru untuk tempat

hunian. Wilayah yang sangat diminati adalah Jakarta Timur dan Jakarta Barat yang masih menyediakan lahan yang cukup luas. Di samping itu juga banyak dari mereka yang pindah ke daerah penyangga ibukota.

Kebijaksanaan lain yang ditempuh adalah dengan melakukan pengembangan wilayah ke arah Barat dan Timur. Potensi ekonomi yang ada di daerah ini dioptimalkan dan sebagai akibatnya banyak menarik kaum pendatang untuk pindah ke Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Pengembangan kota ke arah Barat dan Timur juga dimaksudkan untuk melindungi kawasan Selatan yang semula berfungsi sebagai daerah resapan air.

Akibat dari adanya kebijaksanaan tersebut menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat, sedangkan di Jakarta Pusat terjadi penurunan jumlah penduduk. Terjadi pula pergeseran persebaran penduduk di DKI Jakarta, sejak tahun 1990 Jakarta Timur merupakan kotamadya yang paling banyak di tinggali. Pada tahun 1995 sekitar 26,19 persen penduduk DKI Jakarta tinggal di Jakarta Timur, menetap di Jakarta Selatan sekitar 22,37 persen, dan Jakarta Pusat adalah kotamadya yang paling sedikit ditinggali, hanya dihuni oleh sekitar 10,67 persen Penduduk DKI Jakarta. Pada tahun 1999 semakin banyak penduduk yang tinggal di Jakarta Timur dan Jakarta Barat, sedangkan yang tinggal di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan mengalami penurunan.

Kepadatan penduduk diperoleh dengan membandingkan antara jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Dengan luas wilayah relatif sama tetapi jumlah penduduk terus meningkat, maka kepadatan penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1980, sekitar 9.808 jiwa menempati luas 1 km². Satu dekade kemudian kepadatan penduduk DKI Jakarta telah meningkat menjadi 12.400 jiwa/km², sembilan tahun kemudian meningkat lagi menjadi 14.518 jiwa/km².

Jakarta Timur walaupun mempunyai jumlah penduduk yang relatif tinggi namun tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah yaitu

13.624 per km², hal ini dikarenakan kotamadya tersebut mempunyai wilayah yang cukup luas.

Kepadatan penduduk yang terus meningkat perlu di waspadi oleh Pemda DKI Jakarta, karena dapat menimbulkan berbagai hal yang kurang baik. Seperti timbulnya masalah sosial, misalnya kemiskinan, pengangguran, perilaku negatif warga kota seperti peningkatan kriminalitas, pengangguran, kemiskinan, kekerasan, kecelakaan lalu lintas, penyalahgunaan narkoba dan perkosaan.

2.1.5 Definisi Pengangguran

Pengangguran didefinisikan sebagai orang yang bekerja rata-rata di bawah 4 jam perminggu, sedangkan setengah pengangguran kalau bekerja rata-rata di bawah 35 jam perminggu (BPS, Sakernas, 1992) seperti yang dikutip Agus Daryanto (2001).

Sebab-sebab pengangguran dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Menganggur, karena memang tidak bekerja (orang tua, pensiunan, sakit).
2. Menganggur, karena baru selesai pendidikan dan sedang mencari pekerjaan, dan
3. Menganggur, karena dikeluarkan dari pekerjaan.

Golongan penganggur kedua dan ketiga, lebih banyak disebabkan karena kondisi ekonomi yang membuat industri tidak bisa berkembang dan menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduk.

Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 lalu telah membawa dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik secara nasional maupun di DKI Jakarta. Di bidang sosial, krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga saat ini ternyata juga telah menimbulkan banyak persoalan sosial baru. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah makin meningkatnya angka pengangguran baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kondisi ini memang tidak bisa dihindari.

meningkat dengan terganggunya kegiatan produksi, cukup banyak perusahaan yang terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibat meningkatnya angka pengangguran ini, jumlah penduduk miskin menjadi makin bertambah. Tindak kriminalitas pun makin meluas dan meningkat, terlebih lagi yang terjadi di wilayah perkotaan khususnya di ibukota Jakarta.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 3 %, maka pengangguran di tahun 2003 akan mencapai 43,6 juta jiwa. Mereka ini akan menjadi beban sosial yang dapat membawa kerawanan dan kriminalitas bahkan kerusuhan sosial (beritapolitik.150m.com/skenario/kisruh.htm)

Fakta-fakta di atas menggambarkan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat diciptakan sangat tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Khususnya di perkotaan, angkatan kerja usia muda (AKUM) bertambah sangat pesat rata-rata 9 persen (laki-laki) dan 15 persen (perempuan) per tahun. Hal ini berkaitan erat masalah klasik, urbanisasi.

Bagi AKUM, bekerja di sektor pertanian adalah kurang menarik karena di samping pendapatan rendah, musim panen/tuai hasil di sektor ini relatif lebih lama di banding di sektor lain. Hal ini kemudian mendorong urbanisasi ke perkotaan. Selain itu, lahan pertanian di perkotaan telah menurun secara drastis, sementara angkatan kerja yang sebelumnya bekerja di sektor tersebut tidak dapat bekerja di sektor lain karena rendahnya keahlian dan pendidikan yang dimiliki.

Pengangguran kini telah menjadi masalah terbesar di negeri ini. Bahkan lebih besar dari konflik politik yang terjadi di Indonesia, belakangan terakhir ini. Anehnya, di tengah meledaknya angka pengangguran, kehidupan kaum jet set sepertinya juga tidak berkurang. Bahkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin terlihat semakin jelas, terutama di kota Jakarta. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pengemis, gelandangan yang turun ke jalan-jalan, namun mobil mewah sekelas Jaguar dan Ferrari bebas berkeliaran.

Harus diakui, hingga kini telah terjadi akumulasi dari jumlah penduduk yang tidak mendapat pekerjaan. Sebelum krisis, tingkat pengangguran hanya 4,7 persen. Sementara setelah krisis meningkat lagi menjadi 8,1 persen pada tahun 2001 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya (2000) yang mencapai 6,1. Data terakhir sebagaimana pernah diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea menunjukkan, pengangguran di Indonesia sekarang ini telah mencapai 36,9 juta orang. Delapan juta orang di antaranya merupakan penganggur terbuka dan selebihnya setengah menganggur. Jumlah itu ditambah lagi dengan 2-3 juta penganggur baru yang memasuki dunia kerja setiap tahun, dan ratusan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terpaksa kembali ke Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Faisal Baasir (2002), penganggur terbuka adalah mereka yang sama sekali tak memiliki pekerjaan. Sedangkan setengah penganggur adalah mereka yang bekerja kurang 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan. Jika dilihat dari komposisi pengangguran yang ada, angka pengangguran tertinggi terjadi pada kelompok masyarakat usia muda (15-24 tahun) serta kelompok marginal (pekerja di sektor informal). Penyebabnya antara lain, karena banyak perusahaan yang melakukan PHK setelah tak mampu lagi menanggung biaya operasional. Selain itu, kualitas angkatan kerja yang ada juga masih rendah. Sebagai gambaran, persentase angkatan kerja yang berpendidikan sekolah dasar mencapai 60 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang. Sementara persentase angkatan kerja yang telah mengenyam pendidikan tinggi kurang dari 2,5 persen.

Lebih dari itu, ledakan pengangguran bisa memicu timbulnya tindakan kriminalitas, dan bukan tidak mungkin menimbulkan revolusi jika tidak segera dicari jalan keluar atau penanganannya.

2.1.6 Definisi Kemiskinan

Menurut Siti Zubaidah, M.Si (2001), kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah negara yang menyebabkan ketidak nyamanan hidup, terancamnya penegakan hukum dan keadilan, terancamnya bargaining (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Berbagai cara pandang terhadap kemiskinan ini telah digunakan untuk menganalisis kondisi kemiskinan bangsa kita saat ini, misalnya miskin ekonomi, pendidikan, akses, moral, penegakan hukum dan keadilan, harga diri.

Menurut SMERU dan Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (2002), bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Lainnya memberikan pengertian yang lebih luas dengan memasukkan dimensi-dimensi sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat bahwa kemiskinan timbul karena adanya ketimpangan dalam pemilikan alat produksi, bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat. Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat di bawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi. Yang terakhir ini lebih dikenal sebagai kemiskinan struktural.

Menurut Badan Pusat Statistik (2000) yang dikutip Rudy C Tarumingkeng, PhD (2001), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Menurut hasil survey Susenas (1999), kemiskinan disetarakan dengan pengeluaran untuk bahan makanan dan non makanan sebesar Rp.89.845,-/kapita/bulan dan Rp.69.420,-/kapita/bulan.

Menurut analisis Marsuki definisi tentang kemiskinan telah dapat dirumuskan pada konferensi dunia tentang pembangunan sosial di

Kopenhagen tahun 1995, sebagai berikut: "Kemiskinan memiliki wujud majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses terhadap dunia pendidikan dan layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.

Pengaruh ekonomi dapat menimbulkan tindakan kriminalitas, misalnya saja karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat (Beny Suntoyo, 2003).

2.2 Kerangka Berpikir

Dalam usaha mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat dan membentuk citra bangsa Indonesia di mata Internasional harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Selain itu perlu dicari faktor yang menyebabkan tindakan kriminalitas dikalangan masyarakat, sehingga usaha untuk mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat dapat tercapai.

Mengurangi tingkat kriminalitas merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan tersebut tidak mudah untuk diwujudkan, karena hal ini membutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat, aparat kepolisian, dan pemerintah. Untuk mengurangi tingkat kriminalitas selain peraturan-peraturan (UU) yang ada sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman, juga dipengaruhi oleh banyak faktor dominan diantaranya adalah penduduk, perganguan, serta kemiskinan. Maka kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerataan jumlah penduduk diberbagai daerah harus terus dilakukan, agar tidak terjadinya penumpukkan disuatu daerah tertentu. Dan juga ledakan penduduk harus segera ditangani agar tidak berimbas ke masalah yang lainnya seperti masalah kriminalitas.
2. Masalah pengangguran harus benar-benar di pikirkan jalan keluarnya. Salah satunya dengan memperbanyak lapangan pekerjaan di segala bidang kehidupan masyarakat.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat perlu di tangani lebih serius, agar masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat berkurang.

Dari uraian di atas dapat diduga bahwa penduduk, pengangguran, dan kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas.

2.3 Pengajuan Hipotesis

- Hipotesis 1 : Faktor penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas.
- Hipotesis 2 : Faktor pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas.
- Hipotesis 3 : Faktor kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas.